

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan memainkan fungsi cukup krusial di seluruh sistem perekonomian di Indonesia. Bank memiliki kontribusi dalam mengukuhkan kemajuan negara dengan mendukung perkembangan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional untuk meraih kemajuan masyarakat. Tanggung jawab utama dari industri perbankan adalah menghimpun dana dalam berbagai bentuk dari seluruh lapisan agar dikelola untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan sebuah institusi yang mengakumulasi uang dari publik melalui berbagai jenis simpanan dan selanjutnya menyalurkan kepada individu atau pihak lain dalam bentuk pinjaman atau metode lainnya guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan, perbankan bukan hanya berfungsi sebagai lokasi penyimpanan uang, melainkan juga sebagai penggerak investasi dan penyedia kredit yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, terutama di era pembangunan yang terus berlangsung. Perbankan pada dasarnya berperan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan mengumpulkan uang dari perusahaan dalam bentuk tabungan serta menyediakan pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Masyarakat terutama pekerja dan pengusaha, mempercayakan perbankan untuk berbagai kegiatan seperti pinjam meminjam. Lembaga keuangan ini banyak memberikan dukungan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seperti penyaluran pinjaman, penyediaan modal usaha untuk pengusaha serta lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika perbankan mengalami pertumbuhan yang pesat (Dianti *et al.*, 2024).

Berbagai hal yang memengaruhi keputusan bank dalam memberikan kredit, serta minat masyarakat untuk meminjamnya. Bisa dari faktor bank itu sendiri seperti *risk appetite* terhadap suatu sektor, tingkat kredit macet, kurangnya modal dan sebagainya ataupun juga faktor makro seperti tingkat suku bunga, nilai

tukar rupiah, target ekspor dan sebagainya. Pergerakan faktor makro tersebut berpengaruh pada pinjaman dalam sektor perbankan yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: pinjaman untuk modal kerja, pinjaman untuk investasi serta pinjaman untuk konsumsi (Rompas, 2021).

Jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat diharapkan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan semakin banyaknya jumlah kredit yang diberikan, sehingga pendapatan dari industri perbankan juga akan bertambah. Peningkatan pendapatan menandakan modal yang lebih kuat, pada gilirannya akan memperbaiki kesehatan industri perbankan. Selain itu, dengan adanya pembiayaan ini dari sisi debitur juga akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas bisnis mereka. Di sisi pemerintah, semakin banyak pinjaman yang diberikan oleh bank dianggap positif, karena hal ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan di berbagai sektor (Suarmanayasa, 2020).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pinjaman dari bank dapat dibagi menjadi pinjaman untuk modal kerja, pinjaman untuk investasi, dan pinjaman konsumsi. Ruang lingkup pinjaman modal kerja meliputi dana yang digunakan untuk memperbesar kapasitas usaha, seperti akuisisi bahan mentah, peningkatan stok, atau pembayaran upah karyawan. Peningkatan pinjaman modal kerja dapat mendukung perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pangsa pasar, yang pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Pinjaman investasi diberikan untuk mendanai proyek jangka panjang, seperti pembelian peralatan atau pembangunan infrastruktur. Kenaikan permintaan akan alat dan proyek konstruksi berhubungan erat dengan kebutuhan tenaga kerja. Pinjaman konsumsi digunakan untuk mendukung pembelian barang-barang kebutuhan seperti kendaraan atau properti.

Menurut Achmad et al., (2024) Pembiayaan untuk kegiatan operasional memiliki peranan yang penting dalam kemajuan ekonomi. Dalam konteks negara yang memiliki sektor riil berkembang dengan baik, pembiayaan modal kerja ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat segmen riil dan meningkatkan daya saing usaha pada level internasional. Peningkatan akses terhadap pinjaman untuk

kegiatan operasional bagi UMKM telah membawa efek yang menguntungkan bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pinjaman ini memungkinkan UMKM untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan pemasaran, dan membuka lapangan kerja baru, semua faktor ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, pembiayaan untuk kegiatan operasional juga membantu perusahaan besar dalam meningkatkan produksi dan daya saingnya. Namun, penggunaan pembiayaan operasional yang tidak hati-hati atau berlebihan dapat menimbulkan risiko keuangan dan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, sangat krusial bagi perusahaan dan pemerintah untuk menilai manfaat dan kerugian sebelum membuat keputusan terkait pembiayaan operasional serta menjaga stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Penelitian ini menekankan pentingnya Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai fokus utama karena peranannya yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan operasional bisnis sehari-hari. Berbeda dengan Kredit Investasi yang biasanya dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek jangka menengah hingga panjang serta pengembangan usaha, KMK bersifat jangka pendek dan ditujukan guna memenuhi kebutuhan modal operasional, seperti membayar gaji, membeli bahan baku, dan melunasi utang usaha. Di samping itu, jika dibandingkan dengan Kredit Konsumsi yang sering kali diarahkan untuk keperluan pribadi dan tidak bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, KMK memiliki sifat yang produktif dan secara langsung mendukung kegiatan ekonomi riil serta pertumbuhan usaha.

Dalam konteks pemberian kredit untuk modal kerja, terdapat beberapa faktor utama yang secara teoritis dan empiris memengaruhi permintaan kredit tersebut, yaitu tingkat bunga, inflasi, dan Pinjaman Bermasalah (NPL). Pertama, teori mengenai tingkat bunga menunjukkan bahwa tingkat bunga adalah biaya pinjaman yang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk mengajukan kredit. Berdasarkan pandangan ekonomi klasik dan moneter, peningkatan tingkat bunga akan menjadikan biaya pinjaman lebih tinggi, yang pada gilirannya cenderung mengurangi permintaan kredit modal kerja, sementara tingkat bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan kredit karena

biaya pinjaman yang lebih murah. Kedua, teori mengenai inflasi menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh terhadap kemampuan membeli dan prediksi harga di masa depan. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan kebutuhan dana kerja bagi perusahaan karena tingginya biaya produksi dan harga bahan baku, yang akan berimbas pada peningkatan permintaan untuk kredit dana kerja. Namun, inflasi yang sangat tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan menggerus daya beli. Kondisi ini secara langsung akan mengurangi minat masyarakat dan dunia usaha untuk mengambil pinjaman kredit. Dengan demikian, hubungan antara inflasi dan kebutuhan kredit dana kerja bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada situasi ekonomi yang ada. Ketiga, teori risiko kredit menjelaskan bahwa Non Performing Loan (NPL) adalah indikator utama yang merefleksikan mutu kredit. Kondisi ini secara langsung berkaitan dengan risiko gagal bayar yang dihadapi bank, karena NPL yang tinggi menandakan banyaknya pinjaman yang tidak dapat ditagih, sehingga bank cenderung lebih hati-hati dalam memberikan kredit dana kerja agar terhindar dari kerugian.

Riset mengenai determinan permintaan kredit modal kerja telah menghasilkan temuan yang bervariasi, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil antar studi. Widyawati & Wahyudi (2016) mengenai "Faktor-Faktor yang Mendorong Pertumbuhan Kredit Modal Kerja di Perbankan Indonesia: Suatu Pendekatan Model Koreksi Kesalahan (ECM)". Riset ini menggunakan variabel pertumbuhan kredit, suku bunga, dana pihak ketiga, kredit bermasalah dan inflasi. Dari penelitian tersebut, mengidentifikasi bahwa kredit bermasalah adalah satu-satunya variabel yang secara signifikan memengaruhi pertumbuhan kredit. Namun, penelitian oleh (Wulandari, 2021) yang melibatkan variabel inflasi, DPK, nilai tukar dan PDB menunjukkan hasil yang berbeda, di mana inflasi justru menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan. Ketidakteraturan temuan ini semakin terlihat saat membandingkannya dengan studi Putra & Rustariyuni (2014) dengan judul "Dampak dana pihak ketiga, BI Rate, dan NPL terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja di BPR di Bali Periode 2009-2014" yang melibatkan variabel DPK, BI rate dan NPL menemukan bahwa semua variabel memiliki pengaruh signifikan. Lebih lanjut, Puji Astutik & Susilowati (2017)

dengan variabel DPK, BOPO, NPL dan PDB, menyimpulkan bahwa hanya DPK dan PDB yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit, sedangkan NPL dan BOPO tidak.

Merujuk pada analisis penelitian terdahulu, ditemukan adanya perbedaan dalam pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kredit modal kerja, baik dari segi parsial maupun simultan. Variasi hasil ini mengindikasikan adanya celah dalam penelitian, khususnya yang berhubungan dengan fokus analisis yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan atau distribusi kredit secara keseluruhan. Pendekatan tersebut lebih merepresentasikan sisi penawaran (supply) dari perbankan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjelaskan variabel utama yang secara langsung memengaruhi permintaan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia sekaligus mengevaluasi pengaruh suku bunga, inflasi dan NPL sebagai faktor-faktor yang mendorong keputusan perusahaan dalam mengajukan pinjaman, yang merupakan representasi dari sisi permintaan (demand) dengan tahun penelitian yang berbeda. Diharapkan, temuan dari penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademis, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi perbankan dan otoritas moneter dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan aspek permintaan dari para pelaku usaha.

Variabel suku bunga, inflasi dan Non-Performing Loan (NPL) adalah faktor-faktor penting, baik secara teori maupun empiris, memengaruhi permintaan terhadap kredit modal kerja dalam industri perbankan. Berbagai studi empiris di Indonesia telah membuktikan bahwa ketiga faktor ini memainkan peranan penting dalam menentukan permintaan dan distribusi kredit modal kerja pada bank umum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini variabel bunga, inflasi dan NPL akan digunakan sebagai faktor utama untuk menganalisis unsur-unsur yang memengaruhi permintaan kredit modal kerja di bank-bank umum Indonesia.

Data mengenai penyaluran kredit di Indonesia selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa jumlah kredit modal kerja secara konsisten melebihi kredit investasi dan konsumsi yang menegaskan pentingnya KMK dalam membiayai sektor bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, fokus penelitian pada KMK

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika pendanaan usaha dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Tabel 1. 1 Perkembangan Kredit Modal Kerja Tahun 2020-2024

Tahun	KMK (Miliar rupiah)	%	Kredit Investasi (Miliar rupiah)	%	Kredit Konsumsi (Miliar rupiah)	%	Jumlah
2020	2.436.734	-	1.446.392	-	1.602.966	-	5.486.092
	(0,44%)		(0,26%)		(0,29%)		
2021	2.586.241	6,2	1.492.884	3,2	1.677.455	4,6	5.756.580
	(0,44%)		(0,25%)		(0,29%)		
2022	2.889.850	11,7	1.663.995	11,4	1.834.689	9,3	6.388.534
	(0,45%)		(0,26%)		(0,28%)		
2023	3.107.978	10,7	1.847.878	11	1.998.828	8,9	6.954.684
	(0,44%)		(0,26%)		(0,28%)		
2024	3.437.547	7,4	1.652.082	-10,5	1.750.770	-12,4	6.840.399
	(0,50%)		(0,24%)		(0,25%)		

Sumber : Bank Indonesia (BI), 2025

Berdasarkan tabel 1.1 dalam jangka waktu lima tahun terakhir jumlah kredit modal kerja yang paling besar penggunaannya. Tahun 2024 angka proporsi KMK terhadap total kredit terjadi lonjakan senilai 0,50 persen dibandingkan dengan kredit investasi maupun kredit konsumsi. Terdapat peningkatan KMK di Indonesia mencapai 11,7% tahun 2022. Ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam periode tersebut, pada tahun tersebut kondisi makroekonomi, likuiditas dan permintaan kredit berada dalam kondisi yang relatif kondusif sehingga mendorong peningkatan penyaluran KMK. Temuan penelitian “Analysis of Determinants of Working Capital Credit Growth at Bank Persero in Indonesia” (Fahmi et al., 2023) menunjukkan bahwa variabel seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), NPL, inflasi dan suku bunga Bank Indonesia secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit modal kerja.

Walaupun penggunaan pinjaman modal kerja meningkat setiap tahun, pertumbuhannya mengalami pelambatan pada tahun 2023 ke 2024 sebesar 3,3 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat hambatan-hambatan tertentu yang mulai mempengaruhi permintaan kredit modal kerja maupun sikap

penyalurannya oleh bank. Salah satu faktor yang sering disebut adalah kenaikan suku bunga kebijakan dan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang meningkat dimana penelitian “The lending implications of loan loss provisioning and monetary policy interest rates” (Dwi Dewianawati et al., 2022) menemukan bahwa kenaikan suku bunga dan peningkatan kerugian kredit dapat menurunkan pertumbuhan kredit secara umum.

Perkembangan kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya suku bunga. Saat suku bunga meningkat, beban bagi masyarakat dalam membayar pinjaman akan semakin berat sehingga menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pinjaman, yang pada gilirannya mengurangi jumlah kredit yang diberikan. Sebaliknya, suku bunga yang menurun dapat meningkatkan permintaan kredit masyarakat. Menurut Lestari *et al.*, (2021) mendefinisikan suku bunga sebagai “biaya dari utang”. Bunga dihitung sebagai persentase harian dari jumlah pokok pinjaman. Peminjam wajib memberikan imbalan kepada pemberi pinjaman atas pemanfaatan sumber daya mereka melalui bunga. Bunga dimaknai sebagai pembayaran yang dilakukan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai balasan atas pemakaian uang dari pemberi pinjaman. Persentase yang digunakan untuk menunjukkan tingkat bunga.

Dalam situasi di mana pinjaman diberikan, laju inflasi dapat mempengaruhi pilihan dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Inflasi yang tinggi bisa mempengaruhi suku bunga bank, sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga inflasi agar tetap berada dalam batas wajar. Ketika inflasi meningkat, usaha perbankan untuk menarik simpanan dari masyarakat akan terhambat, yang pada gilirannya akan mengurangi dan memperlambat pemberian kredit modal kerja. Saat terjadi inflasi, kenaikan harga akan menyebabkan menurunnya kemampuan beli masyarakat, yang dapat berujung pada berkurangnya permintaan akan kredit.

Jumlah pinjaman yang bisa diterima oleh bank, baik dalam jumlah besar maupun kecil, dipengaruhi oleh total dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat. Dana Pihak Ketiga adalah uang yang dihimpun dari masyarakat dan juga sumber lain. DPK bisa mencapai antara 80 hingga 90 persen terhadap total

dana yang dikelola oleh bank (Hadinoto dalam Cristina & Artini, 2018). Ketika DPK meningkat, jumlah kredit yang diberikan juga akan naik, yang artinya akan terjadi peningkatan dalam perkembangan kredit. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat, terutama melalui produk perbankan seperti giro, tabungan, dan deposito, menjadi sumber modal utama. Dengan mengelola dana ini, bank dapat mengoptimalkannya sebagai aset produktif untuk menghasilkan pendapatan. Salah satu cara utama bank menghasilkan pendapatan adalah dengan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Namun, tidak semua bentuk pinjaman yang tersedia bebas dari risiko, di mana beberapa di antaranya mengandung tingkat risiko yang cukup tinggi dan dapat membahayakan stabilitas bank. Makin bertambah jumlah pinjaman yang disalurkan, semakin berat pula risiko yang akan ditanggung oleh bank. Non Performing Loan (NPL) berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa efektif bank dalam mengelola risiko gagal bayar dari debitur. NPL adalah proporsi yang digunakan untuk menilai seberapa efektif bank dapat mengatasi risiko dari ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Rasio NPL yang meningkat menunjukkan bahwa jumlah pinjaman yang bermasalah meningkat, sehingga peluang suatu bank mengalami masalah juga meningkat (Yustian & Zuhroh, 2021). Permintaan kredit modal kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya suku bunga, inflasi, dana pihak ketiga, dan kredit macet. Penelitian ini berfokus pada peran kebijakan bank, khususnya terkait suku bunga dan kondisi ekonomi, dalam mendorong peningkatan permintaan kredit.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut pengaruh variabel suku bunga kredit, inflasi dan Non Performing Loan (NPL) terhadap permintaan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“Determinan Permintaan Kredit Modal Kerja Pada Bank Umum di Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Faktor ekonomi makro perbankan dan kegiatan penyaluran kredit mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Seperti halnya kenaikan harga akan berdampak pada penurunan kemampuan masyarakat untuk membeli barang.

Apabila kemampuan beli masyarakat berkurang, unit produksi rumah tangga akan mengurangi tingkat produksinya dan individu akan mengurangi permintaannya terhadap barang yang dihasilkan. Akibatnya, produsen akan mengalami kerugian jika kapasitas produksi ditambah. Meningkatnya inflasi dapat menyebabkan penurunan permintaan kredit. Sebaliknya, ketika suku bunga kredit meningkat, hal itu menjadi sinyal melemahnya ekonomi perbankan, yang secara langsung menyebabkan masyarakat tidak terlalu tertarik untuk mengajukan pinjaman.

Dalam kenyataannya, situasi ekonomi seringkali tidak stabil dan sering kali mengalami fluktuasi. Saat ekonomi mengalami penurunan, lembaga perbankan cenderung memilih untuk memberikan pinjaman modal kerja. Ketika lebih banyak bank menjalankan pengiriman kredit ini, akan lebih besar pula pendapatan bunga yang diterima. Dengan meningkatnya pendapatan, hal itu bisa berdampak pada peningkatan jumlah keuntungan. Ini jelas berkontribusi pada pertumbuhan modal dan pada akhirnya dapat memperbesar sumber daya untuk memberikan kredit tersebut. Namun, dalam praktiknya, setiap pemberian pinjaman memiliki risiko gagal bayar, sehingga bank harus memperhatikan rasio NPL untuk mencegah ledakan kredit macet yang akan mengakibatkan kerugian bank. Dari uraian diatas penelitian mengambil rumusan masalah adalah

1. Bagaimana perkembangan suku bunga, tingkat inflasi, NPL dan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia periode 1999-2024?
2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga, inflasi dan NPL terhadap permintaan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia periode 1999-2024?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, NPL dan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia periode 1999-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga, Inflasi dan NPL terhadap permintaan kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia periode 1999-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperluas pengetahuan peneliti dan menjadi dokumen referensi pencarian hal-hal yang menyangkut permintaan kredit modal kerja di Indonesia.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan dalam pertimbangan mengenai permintaan kredit modal kerja di bank umum di Indonesia.